

BAB V

KESIMPULAN

Sebagai dua negara yang bertetangga, Indonesia dan Australia mempunyai sejarah panjang dalam hubungan bilateral. Hubungan bilateral kedua negara tersebut tersebut diwarnai banyak pasang surut seiring bergantinya pemerintahan sekaligus kebijakan di masing-masing negara. Ada kalanya kedua negara berhubungan dengan harmonis dengan berbagai kerjasama yang dibangun oleh kedua negara. Namun ada waktu dimana kedua negara saling bersitegang dengan berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan kedua negara.

Hubungan paling rendah yang pernah terjadi dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia adalah pada tahun 1999 setelah kasus disintegrasi Timor Timor dari Indonesia. Kasus disintegrasi tersebut dinilai melukai nasionalisme bangsa Indonesia atas peran aktif Australia dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap kasus Timor Timur. Australia dianggap ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia dan mendukung pemisahan diri Timor Timor dari NKRI. Walaupun pada akhirnya terjalin kembali hubungan bilateral yang baik antar kedua negara, namun sikap australia tersebut tetap menjadi mimpi buruk bangsa Indonesia yang dewasa ini menghadapi kasus separatisme Papua, yang mana ada pihak-pihak dari Australia yang mendukung gerakan separatisme Papua tersebut.

Berbagai bentuk campur tangan dan keterlibatan Australia yang mendukung gerakan separatisme Papua dapat dilihat sejak dimulainya

pembebasan Irian Barat, hingga yang sangat fenomenal yaitu kasus pemberian suaka terhadap 42 warga Papua yang mencari suaka ke pemerintah Australia tahun 2006 yang sempat menyebabkan hubungan antar kedua negara ini merenggang. Hal tersebut kiranya menjadi faktor utama yang mendorong Pemerintah Indonesia perlu mengikat Pemerintah Australia dalam *Lombok Treaty*, agar tidak ikut campur dalam masalah dalam negeri Indonesia, khususnya masalah separatisme Papua.

Lombok Treaty diharapkan menjadi payung hukum yang membatasi Pemerintah Australia untuk ikut campur masalah dalam negeri Indonesia dan selanjutnya menjadi dasar Pemerintah Australia untuk mencegah dan menindak tegas aktor bukan pemerintah di Australia yang mendukung gerakan separatis Papua. Tidak hanya itu, Traktat tersebut juga diharapkan menjadi babak baru kerjasama antar kedua negara yang lebih baik untuk menghadapi tantangan baru di kawasan regional maupun global yang dihadapi kedua negara tersebut.